

Alasan Tiongkok Menjalin Kerja Sama Sektor Energi Migas Dengan Brunei Darussalam Tahun 2013-2018

Dewa Ayu Putri Sanjiwani¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, D.A. Wiwik Dharmiasih³⁾
¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: putrisanjiwani@gmail.com¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, wiwikd@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe China Reasons to Establish Cooperation in Oil and Gas Energy Sector with Brunei Darussalam by using a qualitative method. China's claims in the South China Sea with the nine dash line triggered disputes with ASEAN countries including Brunei Darussalam. The cooperation between China and Brunei Darussalam was also established amid the condition of Brunei Darussalam's oil and gas energy resources which only lasted for about two decades. Therefore, Researcher uses two main concepts, which are bilateral cooperation and alliance in order to answer the motive behind China cooperation with Brunei Darussalam in 2013-2018. This research perceives that China had the desire to establish bilateral cooperation in an effort to seek an alliance from Brunei Darussalam in order to gain support in resolving the South China Sea dispute.

Keywords: *China, Brunei Darussalam, Bilateral Cooperation, Alliance*

1. PENDAHULUAN

Penentuan batas-batas wilayah negara menjadi salah satu pemicu konflik antarnegara. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas wilayah menyebabkan negara-negara sering kali terlibat dalam konflik perebutan wilayah (Folarin, 2015). Terdapat dua cara dalam penyelesaian konflik perebutan wilayah, yaitu militer dan non militer. Upaya militer identik dengan kekerasan, salah satunya adalah perang. Sedangkan upaya non militer yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama (Wiegand, 2015).

Salah satu negara yang sedang terlibat sengketa wilayah adalah Tiongkok.

Poonsiri (2017) menyebutkan bahwa Tiongkok memiliki sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang merupakan negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Keempat negara ASEAN tersebut juga memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan.

Laut Tiongkok Selatan memiliki berbagai potensi diantaranya potensi ekonomis, potensi politis, dan potensi strategis (Ambari, 2020). Hal tersebut menjadikan Laut Tiongkok Selatan mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Tiongkok berusaha menggunakan strategi persuasif dalam

memengaruhi negara yang bersengketa untuk mendukung strategi Tiongkok dalam penyelesaian sengketa. Strategi persuasif Tiongkok yaitu melalui tawaran kerja sama bilateral untuk eksplorasi bersama kawasan Laut Tiongkok Selatan (Zhen, 2018).

Tiongkok menawarkan kerja sama kepada Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Tetapi tidak semua negara yang terlibat konflik mau menerima tawaran kerja sama dengan Tiongkok. Salah satu negara yang jelas telah menerima tawaran kerja sama energi dari Tiongkok dan telah menghasilkan rincian kerja sama adalah Brunei Darussalam, sejak tahun 2013 (Storey, 2018).

Kerja sama yang dijalin oleh Tiongkok dan Brunei Darussalam menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan saat kerja sama ditawarkan dan disepakati, kedua negara masih terlibat konflik di Laut Tiongkok Selatan. Selain bersengketa dengan Tiongkok, sejak tahun 2013 produksi minyak bumi dan gas alam Brunei Darussalam sedang tidak stabil dan diperkirakan hanya bertahan sekira dua dekade lagi (Reuters, 2018). Maka dari itu, Peneliti kemudian mempertanyakan apa yang menjadi alasan Tiongkok tetap menjalin kerja sama sektor energi minyak bumi dan gas alam dengan Brunei Darussalam tahun 2013-2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua tulisan sebagai tinjauan pustaka. Tulisan pertama dari Krista E. Wiegand (2015) dengan judul "*Unexpected Companions: Bilateral Cooperation Between States Involved in Territorial Disputes*". Wiegand melalui kerangka pemikirannya menjelaskan bahwa kerja sama bilateral dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara dalam negara berkonflik. Tulisan Wiegand membantu peneliti dalam menjelaskan bahwa kerja sama bilateral dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa oleh negara yang sedang terlibat konflik.

Tulisan Wiegand belum menjelaskan mengenai mekanisme yang mendasari kerja sama bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah. Hubungan negara menjadi buruk dikarenakan adanya perselisihan wilayah sehingga sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa ditengah hubungan yang buruk. Selain itu, sangat sulit untuk mencapai keinginan negara dalam wilayah sengketa hanya dengan kehendak dan kemampuan sendiri. Dalam situasi konflik biasanya negara akan menjalin aliansi dengan negara lain melalui kerja sama, baik yang terlibat konflik maupun tidak untuk mencari dukungan dalam mencapai tujuan.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya kemudian dijabarkan dalam tulisan kedua dari Douglas M. Gibler (1997) dengan judul "*Control The Issues, Control The Conflict: The Effects Of Alliances That Settle Territorial Issues On Interstate Rivalries*". Gibler menjelaskan bahwa negara menjalin aliansi dengan harapan meningkatkan kemungkinan penyelesaian sengketa territorial serta mencapai tujuan negara. Aliansi memiliki peran penting bagi negara yang sedang terlibat konflik, terutama sengketa wilayah. Terjalannya aliansi membuat negara mampu mengontrol konflik dan sikap lawan dengan membangun hubungan yang baik dengan lawan. Tiongkok yang saat ini sedang terlibat konflik dengan negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan membutuhkan dukungan negara lain untuk diajak beraliansi guna mencapai tujuan negaranya.

Peneliti kemudian memperoleh dua konsep yang akan digunakan sebagai kerangka penelitian yaitu konsep kerja sama bilateral dari tulisan Wiegand (2015) dan konsep aliansi dari tulisan Gibler (1997). Kerangka pemikiran tersebut yang akan membantu Peneliti dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat eksplanatif.

3.2 Level Analisis

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan level analisis negara yaitu Tiongkok.

3.3 Unit Analisis

Peneliti menggunakan unit analisis suatu negara yaitu Tiongkok.

3.4 Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013) terdapat empat langkah dalam analisis data:

1. Menentukan fokus penelitian: Peneliti dalam penelitian ini menentukan fokus penelitian terhadap alasan Tiongkok menjalin kerja sama energi migas dengan Brunei Darussalam.
2. Reduksi data: Peneliti memilah data keseluruhan berkaitan dengan kerja sama

energi Tiongkok dengan Brunei Darussalam.

3. Display data atau penyajian data: Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ambisi Tiongkok Terhadap Laut Tiongkok Selatan

Tiongkok memiliki ambisi terhadap wilayah maritim atau dikenal dengan *Tiongkok maritime ambitions* (Malik, 2020). Tiongkok akan berusaha untuk menguasai wilayah laut manapun yang mampu mewujudkan kepentingan Tiongkok sekalipun wilayah tersebut merupakan wilayah sengketa (Hartman, 2019), seperti Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok beranggapan bahwa Laut Tiongkok Selatan beserta sumber daya di dalamnya merupakan wilayah kedaulatannya dan harus dipertahankan.

Kedaulatan atas wilayah Laut Tiongkok Selatan juga telah menjadi kepentingan inti Tiongkok. Maka dari itu Tiongkok berhak memegang kontrol terhadap Laut Tiongkok Selatan (Malik, 2020). Tiongkok juga berhak untuk membangun dan memperkuat angkatan militernya di Laut Tiongkok Selatan. Klaim Tiongkok terhadap kedaulatan Laut Tiongkok Selatan bagi negaranya tidak

terlepas dari posisi geografis dan potensi yang terkandung di dalamnya.

4.2 Potensi Laut Tiongkok Selatan

Laut Tiongkok Selatan bila ditinjau dari letak geografisnya merupakan daerah yang menyimpan banyak potensi di dalamnya. Tidak hanya wilayah perairan tetapi pulau-pulau dalam Laut Tiongkok Selatan juga mengandung berbagai potensi. Ambari (2020) menjabarkan, potensi tersebut diantaranya:

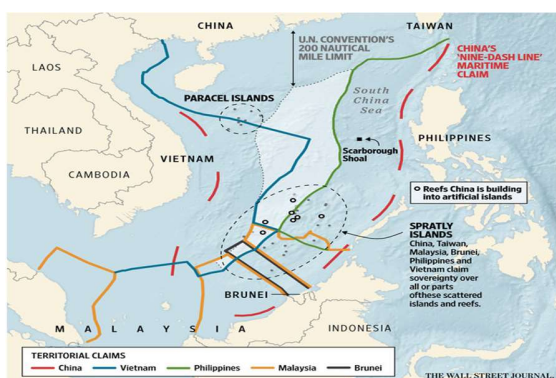
1. Potensi politis: Negara yang dapat menguasai Laut Tiongkok Selatan akan memiliki kekuatan lebih baik di tingkat kawasan maupun internasional.
2. Potensi ekonomis: Laut Tiongkok Selatan kaya akan minyak bumi, gas alam, dan perikanan.
3. Potensi strategis: Laut Tiongkok Selatan sangat strategis sebagai rute pelayaran dan perdagangan terutama minyak bumi dan gas alam. Laut Tiongkok Selatan juga sangat strategis dalam pengembangan dan pelatihan militer.

4.3 Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Pada tahun 1953 Tiongkok menetapkan *nine dash line* sebagai wilayah

resmi klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Broderick, 2015). Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan masuk ke dalam batas territorial Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sehingga klaim antara Tiongkok dengan keempat negara tersebut menjadi tumpang tindih dan berakibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tumpang tindih klaim antara Tiongkok dengan keempat negara tersebut dapat dilihat melalui Gambar 1.

Gambar 1. Klaim Tumpang Tindih Antara Tiongkok dengan Empat Negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan



Sumber: Black (2018)

Gambar 1 memperlihatkan beberapa garis berwarna yang menggambarkan klaim dari masing-masing negara. Garis berwarna merah merupakan klaim *nine dash line* dari Tiongkok. Kemudian garis tersebut tumpang tindih dengan garis berwarna biru yang merupakan klaim Vietnam dan Garis berwarna hijau yang merupakan klaim Filipina. Klaim Tiongkok juga tumpang

tindih dengan Malaysia yang ditandai dengan garis berwarna kuning serta garis berwarna hitam yang merupakan klaim dari Brunei Darussalam. Hampir seluruh klaim Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam masuk ke dalam *klaim nine dash line* Tiongkok.

Tiongkok, Vietnam, Filipina dan Malaysia telah menempatkan pasukan militernya di Laut Tiongkok Selatan dan juga terlibat konfrontasi militer dengan Tiongkok (Mayasari et al, 2013, Sihite, 2017, Cobus, n.d). Bahkan Filipina membawa sengketa Laut Tiongkok Selatan ke pengadilan arbitrase dengan menuntut klaim Tiongkok (Beech, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan Tiongkok kemudian harus mencari strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan negara-negara pengklaim. Tiongkok lalu menawarkan kerja sama kepada Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Tawaran kerja sama terhadap Brunei Darussalam dapat dibilang menarik dikarenakan Brunei Darussalam menjadi negara yang paling sedikit mengklaim Laut Tiongkok Selatan dan juga tidak menaruh dan terlibat konfrontasi militer dengan Tiongkok (Hart, 2018). Tawaran kerja sama Tiongkok juga telah diterima oleh Brunei Darussalam. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dianalisis mengenai

alasan Tiongkok menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam.

4.4 Hubungan Tiongkok dengan Brunei Darussalam

Perkembangan hubungan antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam bisa dibilang tidak ada yang istimewa serta berjalan sangat lambat. Hubungan Tiongkok dengan Brunei Darussalam memburuk ketika Brunei Darussalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Tahun 2013 menjadi era baru bagi hubungan Tiongkok dengan Brunei Darussalam. Kedua negara kemudian rutin melakukan kunjungan kenegaraan. Hal tersebut sekaligus menjadi momentum peningkatan hubungan Tiongkok dengan Brunei Darussalam. Saat kunjungan kenegaraan, Tiongkok menawarkan kerja sama dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Laut Tiongkok Selatan (Yanan, 2020). Kerja sama tersebut telah disepakati oleh Tiongkok maupun Brunei Darussalam. Hal tersebut menjadikan hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam semakin erat yang didasarkan pada kerja sama energi migas.

4.5 Kerja Sama Bilateral Sektor Energi Migas Antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam

Kerja sama Tiongkok dengan Brunei Darussalam diperkuat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman pada tahun 2013 oleh kedua negara, yaitu *Memorandum of Understanding on Establishing on energy cooperation and commercial cooperation stated-owned energy company* (Storey, 2018). Brunei Darussalam memberikan izin bagi perusahaan energi Tiongkok, baik yang milik negara maupun swasta untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber energi lepas pantai Brunei Darussalam (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2013).

Kesepakatan antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam telah menghasilkan beberapa rincian kerja sama sejak tahun 2013 (Storey, 2018). Tahun 2013, Tiongkok dan Brunei Darussalam mengumumkan ke publik bahwa kedua negara telah menandatangani perjanjian kerja sama antara *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) dan *Brunei National Petroleum Company Sdn Bhd* (Petroleum BRUNEI) (Zhen, 2018). Tiongkok dan Brunei Darussalam kembali mengumumkan kerja sama sektor energi migas melalui Petroleum BRUNEI dengan CNOOC pada tahun 2014. Kerja sama

tersebut kemudian menghasilkan perusahaan *joint venture* yang diberi nama *Brunei China Oilfield Services Joint Venture Co* (Lu & Fan, 2015)

Kerja sama sektor energi migas antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam kembali terjalin pada tahun 2015. Kerja sama ini direncanakan berlangsung dalam dua fase. Fase pertama tahun 2015-2016 dan mulai beroperasi pada tahun 2017 (Suratman, 2014). Hasan (2018) menambahkan, kedua negara sepakat membangun perusahaan kompleks kilang dan pabrik petrokimia di Pulau Muara Besar.

Fase kedua kerja sama Tiongkok dengan Brunei Darussalam melalui perusahaan kompleks kilang dan pabrik petrokimia diumumkan dimulai pada tahun 2017 dan selesai tahun 2018 (Xianhua, 2018). Tiongkok pastinya memiliki alasan dalam menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam. Hal tersebut mengingat Brunei Darussalam merupakan negara lawan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok bahkan telah menjadi investor sekaligus partner kerja sama energi migas terbesar bagi Brunei Darussalam.

4.6 Upaya Tiongkok dalam Memperoleh Dukungan Saat Brunei Darussalam Memegang Jabatan Strategis di ASEAN dan Pengaruhnya Terhadap Tiongkok

Sengketa Laut Tiongkok Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan ketegangan. Hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tekanan-tekanan terhadap klaim *nine dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang terus diberikan oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tiongkok kemudian menawarkan upaya persuasif dalam menyelesaikan sengketa melalui kerja sama dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan terutama energi migas.

Sikap Tiongkok sesuai dengan asumsi Wiegand (2015), yang mana Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan negara lawan dalam sengketa yaitu Brunei Darussalam dalam situasi tertentu seperti dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok juga memiliki alasan dalam menawarkan dan menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam.

Reuters (2018) mengatakan, kerja sama yang dijalin oleh Tiongkok dengan Brunei Darussalam bertujuan untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya dalam ASEAN. Tujuan tersebut diperkuat dengan pernyataan beberapa

analisis yang mengatakan bahwa (Reuters, 2018: 1):

“Beijing sees the state on the coast of Borneo (Brunei Darussalam) as a potentially key ally as it stakes its claim to waters in the South China Sea”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Tiongkok melihat Brunei Darussalam sebagai aliansi potensial karena telah menerima tawaran kerja sama Tiongkok. Kerja sama tersebut membuat hubungan Tiongkok dengan Brunei Darussalam membaik setelah sempat memburuk karena sengketa. Oleh karenanya, Tiongkok telah menambahkan Brunei Darussalam kedalam daftar negara-negara ASEAN yang berpotensi mendukung Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Gu, seorang pakar studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial Guangxi menambahkan bahwa aliansi dengan Brunei Darussalam tidak hanya mampu memperoleh dukungan suara dari Brunei Darussalam, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan keinginan Tiongkok (Shumei, 2018). Aliansi tersebut juga akan memberikan peluang bagi Tiongkok dalam menghadapi tekanan ASEAN melalui Brunei Darussalam dalam menangani sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Dukungan Brunei Darussalam terhadap Tiongkok dapat dilihat pertama kali pada tahun 2013, ketika Brunei Darussalam menjabat sebagai ASEAN *Chairmanship* (Arbis, 2013), negara tersebut menggunakan kewenangannya untuk mendukung Tiongkok dalam sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan. Saat ASEAN *chairmanship* biasanya akan mengadakan pertemuan tidak resmi para menteri luar negeri negara-negara ASEAN untuk melakukan diskusi terbuka tentang isu-isu utama pada masa jabatannya. Tetapi Brunei Darussalam menolak mengadakan pertemuan dikarenakan khawatir masalah Laut Tiongkok Selatan akan kembali menjadi topik utama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya (Zhida, 2013). Selain itu saat ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama untuk menentang pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Brunei Darussalam menolak untuk menyetujui pernyataan bersama tersebut (Hart, 2018).

Keputusan Brunei Darussalam menunjukkan bahwa negaranya telah berusaha untuk menghindari sikap bermusuhan dengan Tiongkok (Zhida, 2013). Saat kepemimpinannya sikap Brunei Darussalam menunjukkan bahwa negaranya menghindari kebijakan konfrontatif terhadap Tiongkok. Dukungan

Brunei Darussalam terhadap Tiongkok berlanjut saat Filipina mengadakan pertemuan informal dengan negara-negara ASEAN yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan. Saat itu, Brunei Darussalam menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut (Zhida, 2013).

Upaya Tiongkok untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya juga bertujuan untuk mendukung Tiongkok menjelang putusan pengadilan arbitrase atas sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi putusan pengadilan arbitrase. Semakin banyak aliansi yang bisa didapatkan oleh Tiongkok, maka semakin besar potensi penolakannya tidak hanya dari otoritas pengadilan, tetapi juga keputusan akhirnya (Izzudin, 2016). Maka tidak mengherankan, menjelang keputusan itu, Tiongkok memutuskan untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya untuk meminta dukungannya.

Seorang profesor studi internasional di Universitas Peking, Wang Yong, mengatakan dukungan Brunei Darussalam merupakan keberhasilan penting bagi Tiongkok, yang ingin mengurangi tekanan diplomatik yang meningkat menjelang putusan pengadilan arbitrase (Zhen, 2016). Walaupun akhirnya Tiongkok menuai kekalahan terhadap Filipina dalam putusan pengadilan, namun aliansinya dengan

Brunei Darussalam akan tetap berguna untuk menghadapi pengadilan arbitrase selanjutnya yang mungkin terjadi.

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyatakan bahwa Brunei Darussalam telah sepaham dengan pandangan Tiongkok terkait penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan secara bilateral hanya antara negara-negara yang terlibat langsung tanpa ada campur tangan ASEAN maupun pengadilan arbitrase. Pernyataan Brunei Darussalam dikeluarkan hanya beberapa minggu sebelum keputusan dari pengadilan arbitrase internasional (Zhen, 2016). Hal tersebut tersebut sesuai dengan keinginan Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral bukan multilateral.

Tanggapan *anodyne* ditunjukkan oleh Brunei Darussalam terhadap keputusan akhir pengadilan arbitrase (Zhen, 2016). Sikap Brunei Darussalam yang mendukung Tiongkok kemudian ditentang oleh Filipina, Vietnam dan Malaysia (Zhen, 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa untuk pertama kalinya Tiongkok berhasil memengaruhi *claimant states* untuk sejalan pendapat Tiongkok (Hart, 2018). Keberhasilan Tiongkok tersebut dimulai dengan sikap Brunei Darussalam yang mengabaikan ASEAN dan mendukung Tiongkok.

Dukungan Brunei Darussalam untuk Tiongkok berlanjut hingga Tahun 2018. Pada tahun tersebut Brunei Darussalam terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk masa jabatan lima tahun dari tahun 2018-2022 (Salim, 2017). Berkat keberhasilan Tiongkok dalam menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya sejak tahun 2013, Brunei Darussalam secara terbuka mengumumkan bahwa negaranya mendukung solusi Tiongkok melalui bilateral dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan (Espena & Boming, 2020). Penyelesaian bilateral tersebut dilakukan melalui interaksi dan diskusi langsung dengan masing-masing claimant states tanpa melibatkan ASEAN, UNCLOS, pengadilan arbitrase, maupun pihak luar atau secara multilateral (Hunt, 2018). Selain itu dukungan Brunei Darussalam juga diperlihatkan melalui Pemerintah Brunei Darussalam yang telah melarang media domestiknya untuk mengkritik Tiongkok (Jacques, 2018). Hal tersebut semakin memperjelas adanya dukungan dari Brunei Darussalam terhadap Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Negara yang memegang jabatan sebagai ASEAN *chairmanship* dan Sekretaris Jenderal ASEAN akan memiliki power di ASEAN. Begitupun dengan posisi Brunei Darussalam sebagai ASEAN

chairmanship pada tahun 2013 dan Sekretaris Jenderal ASEAN pada tahun 2018 memberikan *power* kepada Brunei Darussalam. Posisi Brunei Darussalam sebagai ASEAN *chairmanship* memberikan power berupa kewenangan untuk berperan dalam penyusunan *agenda setting* dalam ASEAN (Suzuki, 2020) termasuk memiliki kontrol dalam setiap kegiatan dan pembahasan di ASEAN (Espena & Boming, 2020). *Agenda Setting* setiap negara yang menjadi memiliki kewenangan dalam ASEAN berbeda-beda, tergantung pada negara yang memegang jabatan (Muller, n.d). Brunei Darussalam sebagai ASEAN *chairmanship* memiliki *power agenda setting* yang relatif kuat untuk memungkinkannya menentukan kesepakatan termasuk yang menguntungkan negaranya sendiri.

Sikap Brunei Darussalam tersebut hasil dari upaya Tiongkok yang secara tidak langsung melemahkan sikap Brunei Darussalam dalam saat negaranya memegang jabatan penting di ASEAN. Sering kali Brunei Darussalam memiliki perbedaan pendapat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Aliansi dengan Brunei Darussalam sekaligus dapat membantu untuk memengaruhi negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung Tiongkok yaitu Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand serta Malaysia terhadap Tiongkok

dalam klaimnya di Laut Tiongkok Selatan Kondisi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap posisi Tiongkok dalam sengketa dan ASEAN (Wen & Xiaochen, 2016). Akibatnya, ASEAN akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan kesepakatan bersama dalam menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal tersebut juga akan semakin memberikan keuntungan bagi posisi Tiongkok dalam sengketa.

Viotti & Kauppi (2009) menyebutkan bahwa aliansi merupakan hubungan yang bersifat *take and give*, yang mana masing-masing negara akan memberikan kontribusi dan mendapatkan kontribusi. Tiongkok memberikan kontribusi berupa bantuan dana dan tenaga ahli dalam kerja sama sektor migas kepada Brunei Darussalam. Oleh karena itu, sebagai imbalan atas bantuan tersebut, Tiongkok dapat memanfaatkan Brunei Darussalam sebagai senjatanya mencapai tujuannya dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tujuan Tiongkok telah tercapai dengan menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya untuk mendukung Tiongkok dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tujuan tersebut sesuai dengan strategi Tiongkok untuk meningkatkan kekayaan dan pengaruh Tiongkok serta meyakinkan negara-negara tetangga bahwa keberadaan Tiongkok bukanlah ancaman. Sehingga penggunaan kerja

sama dinilai sangat tepat dibandingkan dengan penggunaan militer. Aliansi tersebut juga dimaksudkan oleh Tiongkok dalam usaha memaksimalkan povernya dalam penguasaan wilayah laut. Sehingga kerja sama migas antara Tiongkok dengan Brunei Darussalam memberikan kontribusi yang dominan bagi Tiongkok.

Brunei Darussalam juga mendapatkan keuntungan walaupun tidak sebesar Tiongkok. Brunei Darussalam telah memberikan kontribusi berupa persetujuan menjalin kerja sama untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam migas di wilayah perairannya termasuk klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Brunei Darussalam juga telah mendukung Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, sehingga mendapatkan kontribusi dari Tiongkok berupa bantuan modal dan sumber daya manusia dari Tiongkok. Kontribusi tersebut dapat memulihkan kondisi ekonomi Brunei Darussalam dan diversifikasi ekonomi. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara melalui kerja sama bersifat relatif.

5. KESIMPULAN

Tiongkok menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam dalam kondisi tertentu yaitu terlibat sengketa dengan negara-negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan yang mengancam tujuan Tiongkok.

Tiongkok menjalin kerja sama sektor energi migas dengan Brunei Darussalam yang merupakan negara lawannya dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Oleh karenanya, kerja sama bilateral digunakan sebagai upaya persuasif oleh Tiongkok dalam mencapai tujuan negaranya yang hanya dapat dicapai salah satunya melalui interaksi dengan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang memegang jabatan penting di ASEAN yaitu sebagai ASEAN Chairmanship tahun 2013 dan Sekjen ASEAN tahun 2018. Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, melalui posisi tersebut Tiongkok melihat peluang menjadikan Brunei Darussalam sebagai aliansinya dalam ASEAN. Aliansi Tiongkok dengan Brunei Darussalam dapat memberikan dukungan bagi Tiongkok dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara ASEAN terutama *claimant states*. Dengan demikian, alasan yang melatarbelakangi Tiongkok menjalin kerja sama bilateral dalam sektor energi migas dengan Brunei Darussalam adalah sebagai upaya persuasif dalam mencari aliansi guna memperoleh dukungan dalam sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ebook:

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Viotti, P. R & Kauppi, M.V. (2009). *International Relations and World Politics*. New Jersey: Pearson Education, Inc

Jurnal:

- Gibler, D. M. (1997). *Control The Issues, Control The Conflict: The Effects Of Alliances That Settle Territorial Issues On Interstate Rivalries*. *International Interactions Journal*, 22 (4), 341-368
- Malik, M. (2020). *Countering China's Maritime Ambitions*. Retrieved 2020, from <https://ipdefenseforum.com/countering-chinas-maritime-ambitions/>
- Poonsiri, P. (2017). *The Territorial Dispute over the South China Sea*. *Willy Brandt School Journal of Public Policy*, 3-35.
- Storey, I. (2018). *President Xi Jinping's Visit to Brunei Highlights Progress and Problems in Bilateral Relations*. *ISEAS-Yusof Ishak Institute Journal*, 83, 1 8
- Suzuki, S. (2020). *Can ASEAN offer a useful model? Chairmanship in decision-making by consensus*. Retrieved 2020, from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2020.1727553>
- Wiegand, K. E. (2015). *Unexpected Companions Bilateral Cooperation Between States Involved in Territorial Disputes*. *Journal Conflict Management and Peace Science*, 28(3), 209–229.

Media Daring:

- Ambari, M. (14/01/2020). Magnet Konflik di Pusaran Laut Cina Selatan. Retrieved 2020, from <https://www.mongabay.co.id/2020/01/14/magnet-konflik-di-pusaran-laut-cina-selatan/>
- Arbis, N. (04/12/2013). *Brunei's ASEAN Chairmanship Scorecard*. Retrieved 2020, from <http://www.cogitasia.com/bruneis-asean-chairmanship-scorecard/>
- Black, B. (22/03/2018). *The South China Sea Disputes: A clash of international law and historical claims*. Retrieved 2020, from <https://sites.psu.edu/jlia/the-south-china-sea-disputes-a-clash-of-international-law-and-historical-claims/>
- Hart, M. (04/04/2018). *Brunei Abandons South China Sea Claim for Chinese Finance*. Retrieved 2020, from <https://www.geopoliticalmonitor.com/brunei-abandons-south-china-sea-claim-for-chinese-finance/>
- Izzudin, M. (16/12/2016). *Courting the little kingdom: Why Brunei matters to China*. Retrieved 2020, from <https://www.policyforum.net/courting-little-kingdom/>
- Jacques, J. (20/02/2018). *China Has Bought Brunei's Silence in South China Sea Dispute*. Retrieved 2020, from <https://www.thetrumpet.com/16927-china-has-bought-bruneis-silence-in-south-china-sea-dispute>
- Reuters. (2018b). *Why China is coming to Brunei's aid as its oil slowly runs out*. Retrieved 2020, from <https://www.scmp.com/print/news/china/diplomacy-defence/article/2135748/why-china-coming-bruneis-aid-its-oil-slowly-runs-out>
- Salim, T. (2017). *Brunei diplomat named as new ASEAN Secretary-General*. Retrieved 2020, from <https://www.thejakartapost.com/asia/2017/11/15/brunei-diplomat-named-as-new-asean-secretary-general.html>
- Shumei, L. (2018). *China, Brunei upgrade ties*. Retrieved 2020, from <http://www.globaltimes.cn/content/128075.shtml>
- Suratman, N. (2014). *China's Hengyi to Start First-Phase Ops at Brunei by 2017*. Retrieved 2020, from <https://www.icis.com/explore/resources/news/2014/10/30/9833796/china-s-hengyi-to-start-first-phase-ops-at-brunei-by-2017/>
- Wen, W. & Xiaochen, C. (2016). *Who Supports China in the South China Sea and Why*. Retrieved 2020, from <https://thediplomat.com/2016/07/who-supports-china-in-the-south-china-sea-and-why/>
- Xianhua. (2018). *China's largest investment project in Brunei to be competed by 2018*. Retrieved 2020, from <https://en.imsilkroad.com/p/77298.html>
- Zhida, J. (2013). *Brunei's Burden*. Retrieved 2020, from http://www.ciis.org.cn/english/2013-04/16/content_5878251.htm
- Zhen, L. (2016). *China woos rival claimant Brunei as it seeks allies ahead of tribunal ruling on territorial disputes in South China Sea*. Retrieved 2020, from <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1937729/china-woos-rival-claimant-brunei-it-seeks-allies-ahead>
- Zhen, L. (2018). *China and Brunei to step up Oil and Gas Development in Disputed South China Sea*. Retrieved 2020, from <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2173959/china-and>

brunei-stepoil-and-gas-
development-disputed-south.

Situs resmi:

Espena, J & Bomping, U.C. (2020). Brunei, ASEAN and the South China Sea. Retrieved 2020 from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/brunei-asean-and-south-china-sea>.

Ministry of Foreign Affairs of Republic of China. (2013, October 11). *China and Brunei Decide to Strengthen Maritime Cooperation to Promote Joint Development*. Retrieved 2020, from https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1088644.shtml